

Analisis Penyebab Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Akhir Tahun: Studi Kasus pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado

Lydia Gita Angelina Simanjuntak
Universitas Singaperbangsa Karawang
2210631010033@student.unsika.ac.id

ABSTRACT

There are four main factors that cause accumulation of budget use at the end of the year, namely budget planning, budget implementation, procurement of goods and services, and human resources. One of the main challenges in BP2LHK Manado budget planning is the mismatch between the proposed activity plans and the budget allocation in the DIPA. Apart from that, limited budget allocations mean that BP2LHK Manado must optimize existing funds based on predetermined priorities. Budget implementation is also influenced by limited resources and regulations regarding the disbursement of PNPB funds. In accordance with Edward III's (1980) policy implementation theory, resources are an important factor in the success of policy implementation. The next factor regarding the success of budget management is very dependent on the quality of human resources, one of which is because they have multiple positions. The lack of employees who handle finances causes the workload to become increasingly heavy, which ultimately hinders budget realization.

Keywords: *factors, accumulation, budget realization*

ABSTRAK

Terdapat empat faktor utama yang menyebabkan akumulasi penggunaan anggaran di akhir tahun, yaitu Perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pengadaan barang dan jasa serta Sumber daya manusia. Salah satu tantangan utama dalam perencanaan anggaran BP2LHK Manado adalah ketidaksesuaian antara rencana kegiatan yang diajukan dengan alokasi anggaran dalam DIPA. Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran membuat BP2LHK Manado harus mengoptimalkan dana yang ada berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Pelaksanaan anggaran juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan peraturan mengenai pencairan dana PNPB. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan Edward III (1980), sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor selanjut mengenai keberhasilan pengelolaan anggaran sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, salah satunya karena rangkap jabatan. Kurangnya pegawai yang menangani keuangan menyebabkan beban kerja semakin berat, yang pada akhirnya menghambat realisasi anggaran.

Kata Kunci: faktor, penumpukan, realisasi anggaran

PENDAHULUAN

Kuangan negara mengalami reformasi ditandai dengan adanya Undang-undang yang telah disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan

dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiga Undang-Undang tersebut mengenai keuangan negara diharapkan memberikan peningkatan dalam hal profesionalitas dan keterbukaan, serta akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan negara sehingga berdampak pada keuangan negara menjadi lebih positif terhadap pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah pelaksanaan negara.

Anggaran sebagai alat untuk menggerakkan suatu roda pemerintahan yang digunakan oleh pemerintah. Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) disusun secara sistematis, dimana terdapat rencana mengenai penerimaan dan pengeluaran untuk satu tahun anggaran, dan rencana tersebut disusun oleh pemerintah pusat yang harus disetujui lebih dahulu oleh Dewan perwakilan rakyat (DPR). APBN dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka kemiskinan, maka disebut sebagai bentuk investasi pemerintah. Banyaknya peran APBN dalam mengatasi hal tersebut, maka APBN harus dikelola dengan baik, tidak hanya pada anggarannya saja, tetapi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai kepada pelaporan dan tanggungjawab terhadap anggaran. Maka, penggunaan APBN harus sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan dilaksanakan tepat waktu.

Menurut Rusqiyati, realisasi anggaran pemerintah berpacu pada “Kurva S”, dimana anggaran tersebut cenderung stabil pada awal tahun, kemudian meningkat di pertengahan tahun dan stabil Kembali pada akhir tahun. Pada akhir tahun, idealnya pemerintah hanya melaksanakan sisa kegiatan yang belum terlaksana dan merapikan administrasi pengelolaan keuangan. Tetapi, rencana yang sudah dibuat kadang kala tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pada nyatanya, realisasi yang sebenarnya anggaran pemerintah di awal tahun banyak yang rendah tetapi di akhir tahun justru mengalami peningkatan anggaran. Dalam hal ini, banyak faktor yang harus diperhatikan dan harus dikaji, mengenai sebenarnya permasalahan apa yang terjadi sehingga menyebabkan tidak sesuainya realisasi anggaran.

Dalam hal ini, pemerintah melakukan beberapa Upaya, seperti perbaikan kelembagaan, penataan sumber daya manusia (SDM), hingga perbaikan penghasilan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, Upaya tersebut dijalankan pemerintah yaitu mempercepat realisasi anggaran dengan diberlakukannya Standard Operating Procedure (SOP) di kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Wilayah (Kanwil), dimana mencakup aspek kecepatan, ketetapan, transparansi dan tanpa biaya dan menggunakan teknologi informasi untuk memperoleh layanan yang lebih efektif dan efisien.

Dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum memberikan hasil yang memuaskan walaupun tujuannya untuk mengatasi penumpukan realisasi anggaran. Dikatakan belum memuaskan karena melihat dari rendahnya realisasi anggaran belanja di semester pertama dan mengalami kenaikan di semester kedua pemerintahan pusat selama tahun 2011-2015. Penumpukan realisasi anggaran tersebut terjadi juga di Balai Penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup dan kehutanan Manado (BP2LHK Manado), Hal ini BP2LHK Manado mengalami

penumpukan mengenai pelaksanaan anggaran belanja. Penumpukan tersebut terjadi di triwulan IV, hal ini pasti sudah tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan pada saat awal perencanaan anggaran.

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) adalah unit pelaksana teknis (UPT) yang memiliki tugas melakukan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, pada penelitian ini, berpacu pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) yang terletak di Manado, Sulawesi Utara. BP2LHK di Kota Manado mengalami penumpukan realisasi anggaran yang meningkat di akhir tahun dan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran.

Beberapa faktor terjadi menyebabkan penumpukan realisasi anggaran yang terjadi di akhir tahun, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengadaan barang, jasa, sumber daya manusia, regulasi pengelolaan anggaran hingga faktor-faktor internal. Perencanaan anggaran apabila kurang tepat maka akan menyulitkan dalam hal realisasi anggaran, bisa menyebabkan terjadinya revisi dan mengharuskan menyusun ulang dan menghabiskan waktu yang lama, selain daripada itu perencanaan tersebut tidak akan maksimal dan berdampak pula pada program kerja yang akan dijalankan. Faktor lain juga terdapat pada kurangnya koordinasi antara lembaga, apabila koordinasi tidak dilakukan dengan baik maka akan terhambat pula realisasi anggaran belanja. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga mempengaruhi hasil pada realisasi anggaran, dalam hal ini SDM yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengelola keuangan menjadi faktor yang memperlambat penyerapan anggaran.

Pada penelitian ini, memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK Manado). Maka, yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK Manado)?¹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata, serta menganalisis berbagai aspek dari suatu kasus tertentu. Dalam pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk artikel, jurnal, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

¹ Arifin, M. (2021). Identifikasi faktor-faktor penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado. *Jurnal Goodwill*, 9(2), 45-58.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan topik penelitian. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih kaya dan detail, karena narasumber diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pandangan serta pengalaman mereka secara terbuka. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen resmi serta literatur yang mendukung penelitian.

Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menyajikan pola atau temuan yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Langkah pertama dalam analisis data adalah memahami isi data secara menyeluruh dengan membaca dan mengamati hasil wawancara serta dokumen secara berulang-ulang. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan dikategorikan berdasarkan tema atau pola yang ditemukan. Setelah itu, peneliti akan menyusun hasil penelitian dengan menghubungkan temuan yang ada dengan teori atau konsep yang relevan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, serta memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran. Informan yang dipilih mencakup Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dalam berbagai bidang, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara, serta pelaksana teknis kegiatan penelitian maupun non-penelitian.

Wawancara berlangsung selama kurang lebih 30 menit, di mana peneliti menggunakan alat bantu seperti alat tulis, laptop, dan perekam suara. Pertanyaan yang diajukan seputar kendala yang dihadapi oleh BP2LHK Manado dalam merealisasikan anggaran, yang sering kali menyebabkan akumulasi penggunaan anggaran di akhir tahun.

Dari wawancara tersebut, ditemukan empat faktor utama yang menyebabkan akumulasi penggunaan anggaran di akhir tahun², yaitu Perencanaan anggaran; Pelaksanaan anggaran; Pengadaan barang dan jasa; Sumber daya manusia.

A. Perencanaan Anggaran

Salah satu tantangan utama dalam perencanaan anggaran BP2LHK Manado adalah ketidaksesuaian antara rencana kegiatan yang diajukan dengan alokasi anggaran dalam DIPA. Hal ini sering terjadi karena tidak adanya skala prioritas dalam perencanaan kegiatan, atau karena eselon 1 menilai bahwa kegiatan

² Widodo, S., & Rahmawati, I. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran dan belanja modal: Studi kasus pada Pemerintah Kota Cirebon. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 8(3), 98-112.

tertentu belum mendesak untuk dilaksanakan. Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran membuat BP2LHK Manado harus mengoptimalkan dana yang ada berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan RKA, BP2LHK Manado masih berpedoman pada pagu anggaran dalam DIPA, yang kurang sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Yunarto (2011), anggaran berbasis kinerja seharusnya disusun berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya agar sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.³

Kesalahan dalam penggunaan akun belanja dalam DIPA juga menjadi tantangan dalam perencanaan anggaran. Hal ini terjadi akibat kurang telitinya petugas dalam mencatat dan menelaah DIPA, sehingga memerlukan revisi sebelum realisasi anggaran dapat dilakukan. Kesalahan dalam dokumen DIPA sering kali menyebabkan keterlambatan dalam realisasi anggaran (Miliasih, 2012).⁴

B. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran di BP2LHK Manado menghadapi beberapa kendala, seperti:

1. Jadwal kegiatan internal yang tidak sinkron dengan jadwal instansi lain.
2. Ketergantungan kegiatan penelitian terhadap kondisi lingkungan (misalnya, musim hujan).
3. Kebijakan pemerintah pusat mengenai tata cara pembayaran dana PNPB yang sering berubah.
4. Ketidaksiplinan dalam mengikuti jadwal yang telah disusun.

Kegiatan penelitian yang bergantung pada musim menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan anggaran. Misalnya, kegiatan penanaman tidak bisa dilakukan sebelum musim hujan tiba, yang berdampak pada keterlambatan realisasi anggaran

Selain itu, pelaksanaan anggaran juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan peraturan mengenai pencairan dana PNPB. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan Edward III (1980), sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.⁵

C. Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang telah diperbarui dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, pengadaan barang dan jasa merupakan serangkaian

³ Yunarto, H. (2011). Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁴ Miliasih, D. (2012). Analisis Kesalahan dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

⁵ Edward III. (1980). Implementing Public Policy. Georgetown University Press.

kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian pengadaan.⁶ Dalam pelaksanaannya, BP2LHK Manado menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Kurangnya pejabat pengadaan yang memiliki sertifikat.
2. Kekhawatiran pejabat pengadaan terhadap pemeriksaan hukum dan auditor.
3. Keterlambatan proses lelang dan kegagalan dalam pelelangan.

Ketidaktersediaan pejabat pengadaan yang bersertifikat menyebabkan rangkap tugas, sehingga beban kerja semakin tinggi. Selain itu, ketakutan terhadap pemeriksaan hukum juga menyebabkan pejabat pengadaan dan PPK menjadi terlalu berhati-hati, yang berujung pada lambatnya proses pengadaan barang dan jasa (Sinaga, 2016).⁷

D. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pengelolaan anggaran sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa masalah terkait SDM di BP2LHK Manado, seperti:

1. Jumlah pegawai yang tidak mencukupi.
2. Pola mutasi pegawai yang menghambat kesinambungan pekerjaan.
3. Rangkap jabatan yang membebani pegawai.
4. Komunikasi yang kurang efektif antar pengelola anggaran.

Kurangnya pegawai yang menangani keuangan menyebabkan beban kerja semakin berat, yang pada akhirnya menghambat realisasi anggaran. Selain itu, mutasi pegawai yang menangani keuangan sering kali menghambat kelancaran proses anggaran, karena pegawai baru memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri.

Komunikasi yang tidak efektif juga menjadi kendala dalam pelaksanaan anggaran. Menurut Edward III (1980), komunikasi yang buruk dalam organisasi dapat menghambat implementasi kebijakan, karena informasi yang tidak tersampaikan dengan baik dapat menimbulkan interpretasi yang keliru.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran di BP2LHK Manado. Perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengadaan barang dan jasa, ditambah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penelitian ini, yang menjadi kesimpulan adalah Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK Manado) dalam pelaksanaan realisasi anggaran memiliki 4 (empat) faktor, diantaranya faktor

⁶ Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Jakarta: Sekretariat Negara.

⁷ Sinaga, R. (2016). Tantangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Publik. Bandung: Penerbit ITB.

perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa, dan faktor sumber daya manusia.

Saran yang bisa diberikan pada penelitian ini adalah, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK Manado) harus lebih mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dijalankan kemudian dana tersebut dialokasikan sesuai dengan rencana berdasarkan prioritas supaya efektif dan efisien, selanjutnya harus ada pengawasan Kuasa Pengguna Anggaran supaya ditingkatkan dalam hal pelaksanaan yang tertib, pertanggungjawaban dan pelaporan, selanjutnya perlu dibuat Bagan Akun Standar (BAS) dan standar minimum anggaran, selanjutnya dapat dibuat penyusunan Penyusunan Operasional Kegiatan (POK), dan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) disusun sebelum tahun anggaran berjalan, dan mengalokasikan anggaran sesuai rencana. Selain itu, bisa diberikan penghargaan dan sanksi bagi pengelola dan pelaksana yang sudah sesuai melakukan tugasnya ataupun lalai dalam melakukan tugasnya terhadap anggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2021). Identifikasi faktor-faktor penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado. *Jurnal Goodwill*, 9(2), 45-58.
- Edward III. (1980). *Implementing Public Policy*. Georgetown University Press.
- Miliasih, D. (2012). *Analisis Kesalahan dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sinaga, R. (2016). *Tantangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Publik*. Penerbit ITB.
- Widodo, S., & Rahmawati, I. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi penumpukan penyerapan anggaran dan belanja modal: Studi kasus pada Pemerintah Kota Cirebon. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 8(3), 98-112.
- Yunarto, H. (2011). *Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Publik*. Pustaka Pelajar.